Terbit *online*: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/mahardikaadiwidia

Jurnal Mahardika Adiwidia

e-ISSN: 2830-7887

Amal Jariyah atau Eksploitasi? Analisis Hegemoni Wacana Kesejahteraan Guru

Muhammad Nashruddin Ash Shiddiq*, Alif Auliya Fasya, Dinda Adyani Utama, Muhammad Parhan

Universitas Pendidikan Indonesia
*nashruddin@upi.edu

Diterima: 25-05-2026 | Direvisi: 10-06-2026 | Disetujui: 15-06-2026 | Publikasi online: 27-06-2026

ABSTRACT

Education is a conscious process of creating a learning environment that meets the needs of learners as they develop their optimal potential. Underlying quality education is the role of teachers, who significantly impact the development of national education. This study examines the use of hegemony in statements made by the Minister of Religious Affairs regarding teacher welfare—statements framed within Islamic values. The research aims to analyze the forms and functions of hegemony within the Minister's characterization of the teaching profession as a noble calling. A descriptive qualitative method was employed, utilizing Fairclough's critical discourse analysis model. The analysis focused on a speech delivered by the Minister of Religious Affairs at UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, on September 3, 2025. The findings reveal how the public official's statements demonstrate the role of hegemony in shaping ideology to perpetuate power. In the context of cultural hegemony, the statement serves as an effective vehicle for sacralizing the teaching profession by symbolizing it through concepts of eternal spiritual reward and acts of worship. The analysis incorporates religious, cultural, and educational dimensions in maintaining the stability of this hegemony. The study concludes that the spiritualization of the teaching profession functions as an ideological strategy to normalize disparities in welfare and sustain dominance without resorting to coercive power.

Kata kunci: *hegemony, religious, cultural, education.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses sadar untuk membentuk lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam mengembangkan potensi terbaiknya. Pendidikan juga menjadi salah satu faktor peningkat sumber daya manusia di suatu negara (Sanga & Wangdra, 2023). Peran guru menjadi fundamental dalam membentuk karakter siswa. Kinerja guru yang profesional dapat membentuk kepribadian generasi bangsa yang baik dan berkualitas (Indriawati et al., 2022). Guru berperan besar dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian prestasi siswa. Seorang guru diharapkan tidak hanya mendapatkan kemampuan dalam mendidik anak, tetapi juga mendapatkan apresiasi dan kesejahteraan dari pemerintah.

Kesejahteraan guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah gaji yang memadai. Terdapat disparitas yang signifikan antara gaji guru di Indonesia dengan negara maju, termasuk Malaysia. Gaji rata-rata guru di Malaysia berkisar antara RM 2.000 hingga RM 5.000 atau sekitar Rp7,6 juta hingga Rp19 juta per bulan, sementara gaji rata-rata di Indonesia hanya berkisar Rp1,6 hingga Rp2,9 juta. Penghargaan finansial dan sosial terhadap guru mempengaruhi kualitas guru dan hubungannya dengan siswa (Hutasuhut et al., 2025). Studi oleh Fauzan et al. (2025) menunjukkan bahwa kesenjangan penggajian dan jaminan sosial antara guru ASN dan non-ASN di sekolah negeri masih menjadi problematika yang berkelanjutan, di mana pembinaan bagi ASN lebih terstruktur karena adanya regulasi yang jelas, sedangkan bagi non-ASN sangat bergantung pada alokasi RKAS atau BOS dan inisiatif sekolah.

Selain faktor gaji, kesejahteraan guru juga terkait dengan jaminan profesi, kesempatan pengembangan diri, dan pengakuan sosial dari negara dan masyarakat. Tilaar (2002) menegaskan bahwa pendidikan nasional tidak akan berjalan optimal tanpa perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Suryana (2019) menyatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi prasyarat penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Nawawi (2020) menyoroti bahwa rendahnya kesejahteraan guru dapat menurunkan motivasi kerja dan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran.

Dalam perspektif agama, peran guru atau kyai sangat dijunjung tinggi. Islam mengajarkan bahwa peran pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Menurut Syaifurrahman & Lestari (2024), diperlukan peran guru pendidikan Islam sebagai motivator, penasihat, dan pembimbing untuk menciptakan siswa yang berkarakter kuat. Namun, di Indonesia, tingkat kesejahteraan tenaga pendidik masih jauh dari harapan. Banyak guru yang masih berpenghasilan di bawah UMR sehingga mencari pekerjaan tambahan. Kondisi ekonomi guru yang tidak stabil membuat minat masyarakat, terutama milenial, untuk menjadi guru menurun (Hutasuhut et al., 2025). Penelitian oleh Masulin et al. (2026) menemukan bahwa rendahnya kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor struktural yang menyebabkan lulusan sarjana pendidikan enggan memasuki profesi guru.

Pada 3 September 2025, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasharuddin Umar, berpidato dalam kegiatan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 3 tahun 2025 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam pidatonya, beliau mengungkapkan rasa kagumnya terhadap profesi guru sebagai pekerjaan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Beliau juga menganalogikan guru dengan "nabi kecil" dan menyatakan bahwa guru merupakan pekerjaan panggilan hati yang berfokus pada amal jariyah, bukan soal material seperti pedagang. Pernyataan ini memicu kontroversi, terutama dari kalangan guru honorer, karena dianggap merendahkan kerja keras dan dedikasi guru terhadap siswa.

Penelitian sebelumnya tentang hegemoni dalam konteks pendidikan telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Sofyan & Baids (2024) menganalisis bagaimana narasi "pahlawan tanpa tanda jasa" digunakan sebagai alat hegemoni untuk menormalisasi rendahnya gaji, beban kerja berlebihan, dan diskriminasi terhadap guru, terutama guru honorer. Andriani (2024) mengkaji wacana "sajuta" (sabar, jujur, tawakal) untuk guru PAUD dan menemukan bahwa wacana tersebut berfungsi sebagai upaya penghiburan, sindiran terhadap kesejahteraan yang kurang, serta rasionalisasi pengabdian dan bayaran di surga. Penelitian oleh Fata et al. (2026)

tentang analisis tindak tutur dalam pidato presiden Indonesia mengenai kesejahteraan guru menunjukkan bahwa penggunaan ekspresif seperti pujian dan label pahlawan nasional berfungsi untuk meningkatkan moral di tengah ketidakseimbangan upah dan beban kerja, sekaligus membentuk persepsi publik tentang responsivitas pemerintah. Maulidiastuti & Ahmadi (2025) dalam penelitian tentang representasi hegemoni Gramsci dalam novel menemukan tiga jenis hegemoni dominan: hegemoni kekuasaan, hegemoni pikiran, dan hegemoni media massa. Arasta & Sigit (2021) mengemukakan bahwa hegemoni kekuasaan berperan dominan dalam membentuk framing berita UU ITE pada website Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Teori hegemoni Gramsci (1971) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui paksaan (coercion), tetapi juga melalui persetujuan (consent) dari masyarakat. Hegemoni bekerja dengan cara menanamkan nilai, ide, atau pandangan tertentu hingga dianggap wajar dan alamiah oleh masyarakat. Dalam konteks pendidikan dan kesejahteraan guru, teori hegemoni digunakan untuk melihat bagaimana pernyataan pejabat publik berpotensi membentuk opini atau kesadaran kolektif masyarakat. Penelitian Yudis (2026) tentang analisis wacana kritis terhadap kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa wacana kebijakan bukan sekadar rumusan pedagogis, melainkan artikulasi ideologi negara yang bekerja secara hegemonik.

Penelitian ini berfokus pada jenis hegemoni menurut Antonio Gramsci yang dominan dalam pernyataan Menteri Agama. Objek penelitian menggunakan media verbal yang jarang diteliti oleh peneliti lain. Nilai-nilai keagamaan yang membentuk bingkai citra seorang guru menjadi salah satu fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan fungsi hegemoni dalam pernyataan Menteri Agama menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci dan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk mengidentifikasi bagaimana wacana pejabat publik membentuk kesadaran sosial masyarakat tentang kemuliaan guru dan pengaruhnya terhadap pandangan mengenai kesejahteraan guru di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek kajian difokuskan pada satu pernyataan publik dari Menteri Agama. Kedua, penelitian ini hanya menganalisis teks pidato secara verbal tanpa meninjau aspek nonverbal atau konteks sosial politik yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan tidak bermaksud menggeneralisasi temuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya mengenai teori hegemoni telah banyak diteliti oleh peneliti lain. (Maulidiastuti et al., 2025) dalam penelitiannya tentang " Representasi Hegemoni Gramsci dalan Novel 'Teruslah Bodoh Jangan Pintar' Karya Tere Liye" menjelaskan bahwa dalam novel tersebut, terdapat tiga jenis hegemoni dominan, yaitu hegemoni kekuasaan, hegemoni pikiran, dan hegemoni media maasa. Selain itu, ideologi dalam novel tersebut antara lain ideologi kapitalisme, ideologi konservativme, dan ideologi ekologisme. Lalu penelitian dari (Arasta et al., 2021) dalam penelitiannya "Hegemoni Kekuasaan dalam Pemilihan Wacana Berita UU ITE pada Website Kementerian Komunikasi dan Informasi" mengemukakan bahwa

hegemoni kekuasaan berperan dominan dalam membentuk framing berita UU ITE pada website Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam kategori 'sorotan media'.Lalu, penelitian dari Amanda, 2021 tentang " Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia" menjelaskan bahwa bentuk diplomasi Tiongkok terhadap negara Indonesia secara hegemoni menanamkan nilai-nilai yang dianut Tiongkok kepada masyarakat Indonesia. Secara tanpa sadar, orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Tiongkok di Indonesia menganggap wajar etos kerja orang Tiongkok.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis kondisi fenomena secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dan hasilnya lebih mengutamakan makna (Sugiyono, 2020). Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini menjelaskan bagaimana hegemoni bekerja dalam pernyataan Menteri Agama terkait kemuliaan guru sebagai pengabdian hidup untuk menutupi realitas kesenjangan kesejahteraan guru.

Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough yang mencakup tiga dimensi analisis: (1) analisis teks yang meneliti struktur linguistik dan representasi ideologis dalam bahasa; (2) analisis praktik diskursif yang mengeksplorasi proses produksi dan konsumsi teks media; dan (3) analisis praktik sosiokultural yang menghubungkan wacana dengan konteks sosial dan relasi kekuasaan (Fairclough, 1995). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap bagaimana wacana dibentuk oleh struktur sosial sekaligus membentuk realitas sosial. Pendekatan AWK juga telah digunakan dalam berbagai penelitian kebijakan pendidikan untuk mengungkap relasi kuasa di balik wacana publik (Sugilestari & Sobari, 2026; Yudis, 2026).

Sumber data penelitian adalah teks pidato Menteri Agama di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 3 September 2025, yang diunggah di kanal YouTube Kementerian Agama, serta pemberitaan media daring tentang pernyataan tersebut. Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai isi pidato. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui transkripsi pidato, dokumentasi pemberitaan media, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber data (pidato dan pemberitaan media) dan triangulasi teori (Gramsci dan Fairclough).

Dalam kerangka pemikiran Antonio Gramsci (1971), hegemoni tidak hanya mencakup dominasi kekuasaan politik secara langsung, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan pengaruh melalui persetujuan dan penerimaan sukarela

masyarakat. Jenis-jenis hegemoni Gramsci yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

Hegemoni Ideologis: Bentuk dominasi melalui penyebaran gagasan atau nilai-nilai tertentu hingga diterima sebagai "kebenaran umum" oleh masyarakat (Gramsci, 1971). Suatu kelas sosial tertentu menghegemoni kelas sosial lainnya melalui ideologi (Falah, 2018).

Hegemoni Moral-Intelektual: Kaum intelektual dan pemimpin moral memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan hegemoni (Buci-Glucksmann, 1980). Penguasa yang memiliki nilai-nilai tertentu, pengetahuan, dan jabatan akan lebih dipatuhi karena dianggap memiliki keahlian di bidang tertentu.

Hegemoni Kultural: Nilai dan norma dari kelompok dominan disebarkan melalui institusi sosial seperti pendidikan, agama, dan media (Femia, 1981). Dominasi dipertahankan melalui ideologi dan budaya yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada dimensi teks, pidato Menteri Agama secara eksplisit membedakan antara guru dan pedagang: "Maka itu, jangan ikut-ikutan para pedagang, emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya. Bukan cari uang. Kalau mau cari uang, jangan jadi guru, jadi pedaganglah."

Pembedaan ini merepresentasikan ideologi bahwa profesi guru adalah panggilan jiwa yang luhur dan antitesis dari pencarian keuntungan material. Pada tataran praktik diskursif, pernyataan ini diproduksi oleh pejabat negara yang memiliki otoritas keagamaan dan disebarluaskan melalui media massa, sehingga ideologi tersebut diterima sebagai "kebenaran umum" oleh masyarakat. Penelitian oleh Widodo et al. (2025) menunjukkan bahwa guru yang memiliki kesejahteraan subjektif tinggi cenderung lebih efektif dalam mengajar, memberikan dukungan emosional kepada siswa, dan memberikan emosi positif. Namun, ideologi yang menekankan pengabdian spiritual justru dapat mengaburkan pentingnya kesejahteraan subjektif guru.

Implikasi terhadap kesejahteraan sangat signifikan. Ideologi bahwa guru adalah pekerjaan mulia yang tidak mencari uang berfungsi untuk menormalisasi gaji rendah. Jika pandangan ini diterima, tuntutan guru untuk mendapatkan gaji memadai menjadi teredam karena nilai "kemuliaan guru" didorong untuk lebih ditekankan daripada aspek finansial. Sofyan & Baids (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa narasi "pahlawan tanpa tanda jasa" telah menjadi alat legitimasi untuk menormalisasi rendahnya gaji, beban kerja berlebihan, dan diskriminasi terhadap guru. Hal ini sejalan dengan temuan Andriani (2024) bahwa wacana "sajuta" (sabar, jujur, tawakal) berfungsi sebagai rasionalisasi pengabdian dan bayaran di surga bagi guru PAUD. Pada dimensi praktik sosiokultural, wacana ini merefleksikan dan memperkuat struktur sosial yang menempatkan guru dalam posisi subordinat. Fata et al. (2026) dalam analisis pidato presiden Indonesia menemukan bahwa penggunaan ekspresif seperti pujian dan label pahlawan nasional berfungsi untuk meningkatkan moral di tengah ketidakseimbangan upah dan beban kerja, sekaligus

membentuk persepsi publik tentang responsivitas pemerintah tanpa mengubah kondisi material secara signifikan.

Hegemoni Moral-Intelektual: Otoritas Keagamaan dan Definisi Guru Eksklusif

Pada dimensi teks, Menteri Agama menggunakan terminologi filosofis dan spiritual yang mendalam untuk mendefinisikan guru: "Guru berasal dari bahasa Sansekerta: gu artinya kegelapan, ru artinya obor." Beliau juga menyetarakan guru dengan mursyid dan syekh, serta menyatakan bahwa guru adalah "nabi kecil" yang harus menjauhi dosa.

Definisi guru yang eksklusif ini menempatkan guru pada standar moral yang sangat tinggi. Guru sejati didefinisikan sebagai pribadi yang mampu mengajar dengan spiritualnya (rasa dan batin), bukan hanya dengan rasio. Beliau memposisikan guru agama berbeda dengan guru sekuler. Melalui definisi yang luhur dan spiritual ini, tuntutan material secara inheren dikesampingkan karena guru dianggap memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi.

Pada tataran praktik diskursif, sebagai Menteri Agama, wacana yang disampaikan memiliki otoritas moral dan intelektual dalam mendefinisikan peran guru agama. Penggunaan istilah keagamaan seperti "mursyid" dan "nabi kecil" memperkuat posisi beliau sebagai pemimpin moral yang berhak menentukan apa yang "seharusnya" menjadi orientasi seorang guru. Penelitian oleh Sugilestari & Sobari (2026) tentang analisis wacana kritis kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai arena pergulatan makna antara wacana inovasi yang dilegitimasi pemerintah dan wacana resistensi yang diartikulasikan guru. Hal serupa terjadi dalam wacana Menteri Agama, di mana otoritas moral-intelektual digunakan untuk mendominasi dan meredam resistensi terhadap ketimpangan kesejahteraan. Pada dimensi praktik sosiokultural, hegemoni moral-intelektual ini diperkuat oleh struktur sosial yang menempatkan tokoh agama dalam posisi otoritatif. Masyarakat Indonesia yang religius cenderung menerima definisi guru dari tokoh agama tanpa kritik, sehingga reproduksi ketimpangan struktural berlangsung secara halus melalui otoritas moral. Studi tentang makna pendidikan Gramsci (2025) menegaskan bahwa guru tidak boleh berpuas diri dengan realitas saat ini dan harus memiliki kesadaran kritis serta kepemimpinan transformatif, namun dalam praktiknya, dominasi wacana religius seringkali membatasi ruang kritis tersebut.

Hegemoni Kultural: Sakralisasi Profesi melalui Nilai-Nilai Keagamaan

Pada dimensi teks, wacana Menteri Agama sangat bergantung pada narasi keagamaan dan budaya untuk memvalidasi posisi guru. Guru yang sejati harus melakukan persiapan spiritual yang mendalam: "Seperti salat tahajud, salat duha, dan membaca surah Al-Fatihah sebelum mengajar." Beliau juga menyatakan bahwa guru harus "masuk surga duluan" sebelum orang lain dan mendapatkan profit (amal jariyah) abadi dari ilmu yang diajarkan.

Konsep kesucian dan pahala abadi dimasukkan dalam ajaran Islam yang sangat dijunjung tinggi. Proses tazkiah (pembersihan jiwa, pikiran, dan hati) sebelum taklim dan proses consecration atau pembatinan materi ajar menjadi penanda identitas guru yang sakral. Dengan mengikat identitas guru pada konsep "kesucian" dan "pahala abadi" dalam bingkai keagamaan, tuntutan material didominasi oleh kewajiban spiritual dan budaya.

Pada tataran praktik diskursif, media massa berperan dalam menyebarluaskan wacana ini, memperkuat narasi bahwa guru adalah figur yang harus mengutamakan pengabdian di atas kesejahteraan material. Penelitian oleh Yudis (2026) tentang ideologi pendidikan dalam kebijakan nasional menunjukkan bahwa dominasi diksi normatif dalam dokumen kebijakan menegaskan relasi kuasa negara dalam menentukan standar pendidikan dan membentuk identitas yang diinginkan. Hal serupa terjadi dalam wacana Menteri Agama, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi instrumen hegemoni kultural.

Pada dimensi praktik sosiokultural, nilai-nilai keagamaan dan tradisi spiritual menjadi sarana dominasi yang paling efektif. Masyarakat tradisional yang sangat menghormati nilai-nilai keagamaan akan lebih mudah patuh terhadap ideologi ini. Melalui simbol kesucian, pahala abadi, dan pengabdian tulus, masyarakat diajak menerima ketimpangan struktural sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan bernilai ibadah. Fauzan et al. (2025) menemukan bahwa pembinaan kesejahteraan bagi guru non-ASN sangat bergantung pada kebijakan sekolah dan inisiatif sendiri, tanpa jaminan yang memadai. Hegemoni kultural yang menekankan nilai spiritual justru memperkuat kondisi ini dengan membuat tuntutan struktural dianggap tidak pantas bagi guru yang "mulia."

Kontradiksi antara Wacana dan Realitas Kebijakan

Menarik untuk dicatat bahwa dalam kesempatan lain, Menteri Agama Nasharuddin Umar menyatakan bahwa kesejahteraan guru terus mengalami peningkatan, dengan indikator perluasan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang melonjak hingga 700 persen pada tahun 2025, kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, serta pengangkatan 52 ribu guru honorer menjadi PPPK dalam tiga tahun terakhir.

Kontradiksi antara pernyataan tentang kemuliaan guru sebagai panggilan jiwa (yang menekankan pengabdian spiritual) dan pernyataan tentang peningkatan kesejahteraan guru (yang mengakui pentingnya aspek material) menunjukkan bahwa negara berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, negara menggunakan hegemoni kultural untuk meredam tuntutan kesejahteraan, namun di sisi lain, negara juga mengakui pentingnya kesejahteraan melalui kebijakan konkret. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni bukanlah strategi tunggal, melainkan kombinasi antara persetujuan (consent) dan konsesi material yang selektif. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo et al. (2025) bahwa intervensi berbasis support group memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan subjektif guru melalui penguatan hubungan sosial, perasaan kebersamaan, dan dukungan emosional, namun tetap membutuhkan dukungan struktural yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci dan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough, wacana Menteri Agama tentang profesi guru menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan melalui penerimaan ideologis yang tertanam dalam kesadaran masyarakat. Pada dimensi teks, penggunaan diksi seperti "panggilan jiwa", "amal jariyah", dan "nabi kecil" membangun citra guru sebagai figur suci

yang mengutamakan pengabdian spiritual. Pada dimensi praktik diskursif, wacana ini diproduksi oleh pejabat negara dengan otoritas keagamaan dan disebarluaskan melalui media untuk memperkuat legitimasi. Pada dimensi praktik sosiokultural, wacana ini merefleksikan dan memperkuat struktur sosial yang menempatkan guru dalam posisi subordinat, di mana nilai spiritual digunakan untuk menormalisasi ketimpangan material.

Pada tataran hegemoni ideologis, konstruksi tentang guru sebagai sosok yang beramal jariyah dan tidak berorientasi pada materi berfungsi sebagai mekanisme simbolik untuk menormalisasi ketimpangan kesejahteraan guru. Pada level hegemoni moral-intelektual, posisi pejabat negara sebagai figur otoritatif memperkuat penerimaan wacana, menempatkan nilai spiritual di atas kebutuhan material sehingga potensi kritik terhadap sistem menjadi teredam oleh legitimasi moral. Dalam hegemoni kultural, nilai-nilai keagamaan dan tradisi spiritual menjadi sarana dominasi yang paling efektif. Masyarakat diajak menerima ketimpangan struktural sebagai sesuatu yang wajar dan bernilai ibadah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa hegemoni bekerja halus melalui bahasa, nilai, dan simbol. Spiritualisasi profesi guru menjadi strategi ideologis yang efektif untuk mempertahankan dominasi tanpa perlu menggunakan kekuasaan koersif. Wacana ini tidak hanya mereproduksi ideologi penguasa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana agama, budaya, dan pendidikan berkelindan dalam menjaga stabilitas hegemoni. Untuk memutus rantai hegemoni yang merugikan, diperlukan kesadaran kolektif di kalangan guru serta kebijakan pemerintah yang lebih adil dan transparan dalam meningkatkan kesejahteraan guru (Sofyan & Baids, 2024). Guru sebagai "organik intelektual" perlu mengembangkan kesadaran kritis terhadap wacana hegemonik dan memperjuangkan hak-haknya tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur profesi (Gramsci, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, F. (2024). Analisis makna dalam wacana sajuta (sabar, jujur, tawakal) dan kesejahteraan untuk guru PAUD [Tesis Magister, Universitas Pendidikan Indonesia]. Repository UPI.

Arasta, G. M., & Sigit, R. R. (2021). Hegemoni kekuasaan dalam pemilihan wacana berita UU ITE pada website Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jurnal Mahardika Adiwidia, 1(1), 58-67.

Buci-Glucksmann, C. (1980). Gramsci and the state. Lawrence and Wishart.

Fairclough, N. (1995). Media discourse. Edward Arnold.

Falah, F. (2018). Hegemoni ideologi dalam novel Ayat-Ayat Cinta karya Habiburrahman el Shirazy (Kajian hegemoni Gramsci). Nusa, 13(3), 351-360.

Fata, I. A., Sanusi, S., Saidu, A., & Al-Hamzi, A. M. S. (2026). Speech-act analysis of teacher welfare in Indonesian presidential speeches. Journal of Research in English Language Learning, 7(2). https://doi.org/10.33474/j-reall.v7i2.25154

Fauzan, R., Ridiyawati, A. E., Herlinda, H., Erwanto, H., & Luthfy, P. A. (2025). Implementasi pembinaan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN di sekolah negeri. Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(2). https://doi.org/10.30983/al-marsus.v3i2.10158

Femia, J. V. (1981). Gramsci's political thought: Hegemony, consciousness, and the revolutionary process. Clarendon Press.

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Ed. & Trans.). International Publishers.

Gramsci, A. (2025). A study on the educational meaning of Antonio Gramsci's idea. Korean Citation Index. https://www.kci.go.kr

Hutasuhut, S., Siagian, I., Silaban, H., Sitio, F., Silalahi, H. H., Naibaho, H. S. D., & Lahagu, P. H. (2025). Guru kesejahteraan di Indonesia. Akademisi Masa Depan: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmiah dan Lanjutan, 3(1), 227-235. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277

Indriawati, P., Maulida, N., Erni, D. N., & Putri, W. H. (2022). Kinerja guru dalam mutu pendidikan di SMAN 02 Balikpapan. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 3(3), 204-215. https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12795

Masulin, M., Rachman, F. I., Sari, R., Hidayat, S. A., & Marbun, W. J. (2026). Gelarnya sarjana pendidikan, tapi enggan menjadi pendidik: Bukti kegagalan sistem atau kemunafikan individu? Aljabar: Jurnal Ilmuan Pendidikan, Matematika dan Kebumian, 2(2), 01-09. https://doi.org/10.62383/aljabar.v2i2.979

Maulidiastuti, S. F., & Ahmadi, A. (2025). Representasi hegemoni Gramsci dalam novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Tere Liye. EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia), 5(1), 50-64.

Nawawi, H. (2020). Manajemen sumber daya manusia untuk bisnis yang kompetitif. Gadjah Mada University Press.

Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan adalah faktor penentu daya saing bangsa. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK), 5, 84-90. https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8067

Sofyan, & Baids, F. (2024). Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa: Perspektif hegemoni dalam pendidikan menurut Antonio Gramsci. Kelola: Journal of Islamic Education Management, 10(1). https://doi.org/10.24256/kelola.v10i1.5899

Sugilestari, T., & Sobari, T. (2026). Wacana "Deep Learning" dalam kebijakan pendidikan: Analisis wacana kritis terhadap representasi guru dalam artikel Melintas.id. EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia), 6(1). http://dx.doi.org/10.30821/eunoia.v6i1.5004

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suryana. (2019). Kesejahteraan guru dan kinerja profesional pendidik. Alfabeta.

Syaifurrahman, & Lestari, N. P. (2024). Peran guru pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa. Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 145-162.

Tilaar, H. A. R. (2002). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional. Remaja Rosdakarya.

Widodo, A. N., Purnama, P. N., & Ulayya, A. I. (2025). Peran kelompok dukungan terhadap kesejahteraan subjektif pada guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia: Systematic literature review. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 5(1). https://doi.org/10.55480/saluscultura.v5i1.371

Yudis, T. (2026). Ideologi pendidikan dalam profil lulusan 8 dimensi: Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 [Tesis Magister, Universitas Mataram]. Repository UNRAM.

Hutasuhut, S., Siagian, I., Silaban, H., Sitio, F., Silalahi, HH, Naibaho, HSD, & Lahagu, PH (2025). Guru Kesejahteraan di Indonesia. Akademisi Masa Depan: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmiah dan Lanjutan , 3 (1), 227–235. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277

Indriawati,P.,Maulida, N., Erni, D.N., Putri, W.H. (2022). Kinerja Guru dalam Mutu Pendidikan di SMAN 02 Balikpapan. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 3 (3), 204-215. https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12795

Inilah.com.(2025, 15 Juni). Daftar Gaji Guru di Negara ASEAN, Singapura Tertinggi sedangkan Indonesia Terendah!Diakses pada 29 September 2025, dari https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-website/

Maulidiastuti, S.F.,Ahmadi,A.(2025). Representasi Hegemoni Gramsci dala Novel *Teruslah Bodoh Jangan Pintar* Karya Tere Liye. EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia), 5 (1), 50-64. http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/eunoia/index

Sanga, LD., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK) , 5 , 84–90. https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8067

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryana. (2019). Kesejahteraan guru dan kinerja profesional pendidik. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H. A. R. (2002). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.